

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Nandang. et al., 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawa, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Fakhry. et.al. 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Amin, Rahman, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Arifin, Muhamad Zainul, 2024, *Tindak Pidana Korupsi kerugian dan keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta.
- Budhi, I Gusti Kade, 2021, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Debora, Artha, 2022, *Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Fetrus dan Aturkian Laia, 2023, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Jejak Publisher, Sukabumi.
- Girsang, Junifer, 2012, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit JG Publishing, Jakarta
- Hadiyanto, 2022, *Hukum Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Huda, H. Uu Nurul, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indara, Rona, 2024, *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.
- Ismail, Dian Ekawaty, 2023, *Kewenangan BPK Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Damera Press, Jakarta.
- Latif, Abdul, dkk, 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Latif, Abdul. et al., 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

- Makawimbang, H.F., 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Fakultas hukum UII, Yogyakarta.
- Margono, H., 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Pohan, Agustinus. et.al, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Prasetyo, Handoyo, Muhammad Arafah Sinjar, dan Subakdi, 2024, *Filsafat Hukum: Norma hukum Pidana dan Etika Profesi*, LPPM Press UPN Veterna Jakarta, Jakarta.
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Y.P., 2018, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., 2022, *Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Simatupang, Dian Puji N, 2022, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetarna, Hendar, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Supardi dan Beniharmoni Harefa, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Susanti, Diah Imaningrum, 2019, *Penafsiran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Warjiyati, Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Kencana prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010).

Jurnal

- Ali, Syabilal dan Handar Subhandi Bakhtiar, 2025, *Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023*, Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 3, Nomor 1. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2036>
- Aulia, Muhammad Nur, Sulaiman, 2025, *Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 13, Nomor 1. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.19122>
- Bakhtiar, Handar Subhandi, 2022, *Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol.3 No.2. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>
- Gusman, Erry, 2019, *Kedudukan Bpkp Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 3, <https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.390>
- Hidayat, Sabrina, et.al, 2023, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara*, Halu Oleo Legal Research, Volume. 5, Nomor. 2. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2>
- Mahsun, Mohamad, 2024, *Sinergi Audit Forensik dan Regulasi Hukum dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia: Analisis Kompetensi Auditor dan Tantangan Implementasi*, Jurnal Mahkamah Keadilan, Volume 2 Nomor 1
- Nadila, Komang Della dan A.A. Ngurah Oka, 2025, *Penentuan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Bali*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
- Nikmah, A. Azizia dan Elisabeth S.P., 2023, *Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Novum: Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 3. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0>
- P., I Made F dan I Wayan Parsa, 2021, *Kewenangan BPK dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, volume 10 Nomor 2. DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11

Ryketeng, Masdar, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)*, YUME: Journal of Management, Volume. 3, Nomor.1. <https://doi.org/10.37531/yum.v3i1.629>

Situmeang, Unjur Marroha dan Dwi Setiawan Susanto, 2024, *Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 8 Nomor 3. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2209>

Syahawaluna, Alfian dan Moh. Syahrul Nur Arsyfi, 2024, *Metode dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Jakarta*, Transformasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 7 No. 2

W., I Made Gilang R. dan A.A. Ngurah Oka Y.D, 2025, *Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Media Akademik. <https://doi.org/10.62281/e412f243>

Boboy, Ariance, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat, 2021, *Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Sibatik Journal, Volume 1 Nomor 1. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17>

Tesis/Disertasi

Ronaldi, 2023, *Analisis Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nur Hasan Ismail, 2006, *Disertasi Doktor, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.Jkt Pst

Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2013/P.Tpkor.Yk.

Internet

<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/> diakses pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting-opinion-putusan-rj-lino-lt61b99b6bdeefa/?page=2> diakses pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 01.46 WIB.

<https://antikorupsi.org/id/article/rimba-tafsir-kerugian-negara> diakses pada tanggal 18 Desember 2025 pukul 02.04 WIB.

<https://www.kpsigap.com/surat-permohonan-audit-ulang-kasus-mantan-pejabat-kabupaten-pasaman-barat-diterima-bpkp/> diakses pada tanggal 19 Desember 2025 pukul 01.06 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/05/01/19492987/ptun-audit-bpkp-di-kasus-indosat-im2-cacat-hukum> diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 08.24 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2059846/bpkp-digugat-oleh-rekanan-pln> diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 09.11 WIB.